

ANALISIS KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG

*Analysis Of The Quality Of The Pinrang Regency Government Financial
Statements*

Muhammad Alif Khadafi

Email: muhalifkhadafi@gmail.com

Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Parepare
Jl. Jend. Ahmad Yani No.Km.6, Bukit Harapan, Kec. Soreang, Kota Parepare, Sulawesi
Selatan Kode Pos 91131

Abstract

This research was conducted at the Regional Finance Agency of Pinrang Regency with interview, observation and documentation data collection techniques, as well as using qualitative descriptive methods. This study aims to determine the application of Government Accounting Standards affect the quality of financial reports in the Pinrang Regency Government. The results of the research on the financial statements of the local government of Pinrang Regency meet the requirements to be said to be of high quality because it has fulfilled 3 main requirements, namely properly accounted for, fully reported by fulfilling the requirements 1) Relevant 2) Reliable 3) Comparable and 4) understandable, and independently audited. The application of accrual-based accounting standards is still being applied slowly because it requires strong resources to implement it gradually.

Keywords: Relevant, Reliable, Comparable, Understandable, Accountable

Abstrak

Penelitian ini dilakukan di Badan Keuangan Daerah Kabupaten Pinrang dengan teknik pengumpulan data wawancara, observasi dan dokumentasi, serta menggunakan metode deskriptif kualitatif. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pada Pemerintah Kabupaten Pinrang. Hasil Penelitian Laporan Keuangan pemerintah daerah Kabupaten Pinrang memenuhi syarat untuk dikatakan berkualitas sebab telah memenuhi 3 syarat utama yaitu diakuntansikan dengan benar, dilaporkan secara lengkap dengan memenuhi syarat 1) Relevan 2) Andal 3) dapat dibandingkan dan 4) dapat dipahami, dan diaudit secara independen. Penerapan standar akuntansi berbasis akrual masih diterapkan secara perlahan sebab membutuhkan sumber daya yang kuat untuk menerapkannya secara bertahap.

Kata Kunci : Relevan, Andal, Dapat Dibandingkan, Dapat Dipahami, Diakuntansikan

PENDAHULUAN

Pada era perkembangan Akuntansi Sektor Publik, kebutuhan akuntabilitas sebagai wujud pertanggungjawaban kepada masyarakat atas kinerja Pemerintah menjadi suatu tuntutan yang umum. Menguatnya tuntutan tersebut mengharuskan lembaga pemerintah memberikan informasi atas aktivitas dan kinerja kepada publik. Pemerintah Daerah diberi kewenangan untuk penyelenggaraan pengelolaan keuangan daerah sendiri sehingga Pemerintah Daerah diharapkan dapat meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan yang efektif, efisien, dan transparan. Media pertanggung jawaban dalam bentuk laporan pertanggungjawaban selama 1 tahun anggaran, yaitu Laporan Keuangan Pemerintah



Daerah (LKPD). Unsur kinerja yang harus dipertanggungjawabkan adalah laporan keuangan daerah.

PP 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan adalah amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dalam Pasal 32, bahwa bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. Laporan keuangan daerah adalah suatu proses pengindentifikasian, pengukuran, pencatatan dari transaksi ekonomi (keuangan) dari entitas akuntansi yang ada dalam suatu Pemerintah Daerah yang dijadikan sebagai informasi dalam rangka pertanggung jawaban pengelolaan keuangan entitas akuntansi dan pengambilan keputusan ekonomi oleh pihak-pihak yang memerlukan pengelolaan keuangan secara baik dan sesuai dengan peraturan. Menurut Wahyudiono (2014), laporan keuangan adalah laporan pertanggungjawaban manajer atau pimpinan perusahaan atas pengelolaan perusahaan yang dipercayakan kepadanya kepada pihak-pihak luar perusahaan.

Berbagai pihak mengandalkan informasi keuangan yang disajikan dan dipublikasikan oleh Pemerintah Daerah dengan kegunaan berbeda-beda. Sehingga laporan yang disajikan tersebut harus berkualitas. Laporan keuangan dikatakan berkualitas jika laporan keuangan yang disajikan tersebut memenuhi syarat yaitu diakuntansikan dengan benar, dilaporkan secara lengkap, diaudit secara independen.

Untuk dapat memenuhi karakteristik kualitatif tersebut, maka pengelolaan keuangan di pemerintah daerah tidak terlepas dari peran pegawai yang mengelola dan melakukan pelaporan keuangan selain itu, dengan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi maka pekerjaan tersebut akan lebih mudah untuk harus memiliki kapasitas yang baik dalam mengelola keuangan pemerintah daerah dengan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi.

Jika terjadi sebaliknya, maka pemanfaatan teknologi justru akan mempersulit pekerjaan pegawai. Kompetensi sumber daya manusia adalah kemampuan sumber daya manusia untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang diberikan kepadanya dengan bekal pendidikan, pelatihan dan pengalaman yang cukup memadai. Sumber daya manusia merupakan pilar penyangga utama sekaligus penggerak roda organisasi dalam usaha mewujudkan visi misi serta tujuan dari organisasi tersebut. Meningkatnya tuntutan masyarakat akan pelaksanaan akuntabilitas pengelolaan keuangan Pemerintah.

Daerah menimbulkan reformasi dalam penyajian laporan keuangan yakni pemerintah harus mampu menyediakan semua informasi keuangan yang relevan, jujur dan terbuka kepada publik. Selanjutnya, fungsi informasi dalam laporan keuangan tidak akan memiliki manfaat jika penyajian dan penyampaian informasi keuangan tersebut tidak andal dan tidak tepat waktu, bahwa untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi laporan keuangan Pemerintah Pusat maupun daerah diperlukan adanya audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Pengelolaan keuangan daerah yang baik, Satuan kerja perangkat daerah (SKPD) harus memiliki sumber daya manusia yang berkualitas, didukung dengan latar belakang pendidikan akuntansi, sering mengikuti pendidikan dan pelatihan dan mempunyai pengalaman kerja dibidang keuangan. Untuk menerapkan sistem akuntansi, Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas tersebut akan mampu memahami logika akuntansi dengan baik. Kegagalan sumber daya manusia Pemerintah Daerah dalam memahami logika akuntansi dengan baik. Kegagalan sumber daya manusia akan berdampak kekeliruan laporan keuangan yang dibuat dan ketidak sesuaian laporan dengan standar yang ditetapkan pemerintah. Selain sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi juga memiliki pengaruh terhadap kualitas laporan keuangan terutama keterandalan dan ketepatanwaktuan. Pemanfaatan teknologi berpengaruh terhadap ketepatanwaktuan laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD). Hal ini menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi akan meningkatkan ketepatanwaktuan LKPD.

Fenomena pelaporan keuangan Pemerintah Daerah merupakan sesuatu hal yang menarik untuk dikaji lebih lanjut. Kenyataannya di dalam laporan keuangan Pemerintah Daerah masih banyak disajikan data yang tidak sesuai. Selain itu, juga masih banyak

penyimpangan yang berhasil ditemukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan dalam pelaksanaan audit laporan keuangan pemerintah.

METODE PENELITIAN

Objek penelitian ini adalah di Kabupaten Pinrang dengan pengambilan data di Badan Keuangan Daerah Kabupaten Pinrang dengan waktu penelitian sekitar 2 (dua) bulan dimulai dari bulan Februari sampai April 2020 Informan pada penelitian ini yaitu Pegawai Badan Keuangan Daerah Kabupaten Pinrang. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian terdiri atas 3 teknik pengumpulan data, yaitu teknik observasi, Dokumentasi dan Wawancara. Untuk jenis data yang digunakan adalah data Deskriptif Kualitatif. Teknik Analisis data untuk penelitian ini adalah Deskriptif Kualitatif dimana permulaan penelitian diawali dengan teori ke sebuah data dan memutuskan suatu kesimpulan berupa penolakan atau penerimaan sebuah teori. Sementara pada penelitian kualitatif peneliti memulainya dari data dan menggunakan teori yang sudah ada sebagai landasan untuk menjelaskan dan sesi terakhir mengungkapkan simpulan dengan teori.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Untuk mengetahui Kualitas Laporan Keuangan Kabupaten Pinrang maka diperoleh hasil penelitian sebagai berikut :

1. Diakuntansikan dengan benar

a. Penerapan akuntansi berbasis akrual

Kendala yang dihadapi dalam penerapan sistem akrual ini adalah tenaga kerja yang belum terlalu mengetahui sistem akrual tersebut sehingga butuh waktu untuk pergantian sistem basis kas ke dalam sistem basis akrual apalagi tidak semua pegawai memiliki latar belakang pendidikan akuntansi.

Sistem Akuntansi Akrual didukung dengan adanya PP 71 Tahun 2010 bahwa pemerintah wajib menerapkan akuntansi berbasis akrual dalam pelaporan keuangannya. Basis Akrual merupakan basis yang mengakui pendapatan dan beban berdasarkan tanggal transaksi yang terjadi. Meskipun kas belum dikeluarkan. Dalam hal ini Pemerintah Daerah Kabupaten Pinrang menggunakan basis akrual untuk mengetahui aset, kewajiban dan ekuitas dalam neraca serta pendapatan dan beban dalam laporan operasional dan menggunakan basis kas dalam mengakui pendapatan dan beban dalam Laporan Realisasi Anggaran.

1) Perlakuan Akuntansi Pendapatan pada pelaporan Keuangan Kabupaten Pinrang

Untuk menjalankan program kerja yang sudah dianggarkan setiap periode, Pemerintah Daerah membutuhkan dana untuk pelaksanaannya, Sumber-sumber pendapatan dana untuk membiayai APBD yang disusun setiap tahunnya berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan transfer dan lain-lain pendapatan yang sah. Pendapatan diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan pendapatan yang direalisasi yaitu hak yang telah diterima oleh Pemerintah tanpa terlebih dahulu adanya penagihan.

a) Pendapatan Asli Daerah

PAD merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang sah, dan lain-lain PAD yang sah. Jumlah PAD Kabupaten Pinrang tahun 2019 adalah sebesar Rp. 133.363.942.030, 14 yang terdiri dari :

- (1) Pajak Daerah sebesar Rp. 29.855.768.183,00
- (2) Retribusi Daerah sebesar Rp. 4.379.680.158,00
- (3) Hasil pengelolaan kekayaan Rp. 9.579.675.801,00
- (4) Lain-lain PAD yang sah Rp. 89.548.817.888,14

Pengakuan Akuntansi transaksi PAD diatas adalah :

Tabel 1 Jurnal PAD

Tanggal	Keterangan	Debit (Rp)	Kredit (Rp)
	Piutang	133.363.942.030,14	
	Pendapatan Asli Daerah		133.363.942.030,14
	Kas	133.363.942.030,14	
	Piutang		133.363.942.030,14

b) Pendapatan Transfer

Pendapatan transfer atau dana perimbangan merupakan pendapatan daerah yang berasal dari pemerintah pusat (APBN) maupun Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan yang terdiri dari Dana Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak, Dana Alokasi Khusus, Dana Alokasi Umum, dan lain-lain. Jumlah pendapatan Transfer tahun 2019 adalah sebesar Rp. 1.114.434.013.457,69 yang terdiri dari :

- (1) Dana Bagi Hasil Pajak Rp. 8.622.858.448,00
- (2) Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Rp. 4.934.239.166,00
- (3) Dana Alokasi Umum Rp. 744.790.264.000,00
- (4) Dana Alokasi Khusus Rp. 213.652.723.689,00
- (5) Transfer pemerintah Provinsi Rp. 69.717.764.754,69
- (6) Bantuan Keuangan dari pemerintah daerah provinsi Rp. 72.716.163.400,00

Perlakuan Akuntansi transaksi pendapatan transfer adalah sebagai berikut :

Tabel 2 Jurnal Transfer

Tanggal	Keterangan	Debit (Rp)	Kredit (Rp)
	Piutang	1.114.434.013.457,69	
	Pendapatan Pajak Daerah		1.114.434.013.457,69
	Kas	1.114.434.013.457,69	
	Piutang		1.114.434.013.457,69

c) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah merupakan pendapatan diluar Pendapatan Asli Daerah dan pendapatan transfer yang berupa Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan Dana Hibah dari Pemerintah Pusat. Jumlah Pendapatan Daerah yang sah tahun 2019 adalah sebesar Rp. 53.129.837.777,00 yang terdiri dari :

- (1) Pendapatan Hibah Rp. 53.124.079.777,00
- (2) Pendapatan Lain-lain Rp. 5.758.000,00

Tabel 3 Jurnal Pendapatan yang Sah

Tanggal	Keterangan	Debit (Rp)	Kredit (Rp)
	Piutang	53.129.837.777,00	
	Pendapatan Daerah yang Sah		53.129.837.777,00
	Kas	53.129.837.777,00	
	Piutang		53.129.837.777,00

- 2) Perlakuan Akuntansi Beban pada pelaporan Keuangan Kabupaten Pinrang
Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban, Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban, terjadinya konsumsi aset dan terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa. Beban LO tahun 2019 sebesar Rp. 1.232.938.113.326,73 yang terdiri dari :
- a) Beban Pegawai Rp. 597.459.205.032,00
 - b) Beban Persediaan Rp. 72.120.280.026,00
 - c) Beban Barang dan Jasa Rp. 207.696.764.990,00
 - d) Beban Pemeliharaan Rp. 14.156.627.968,00
 - e) Beban Perjalanan dinas Rp. 51.582.974.109,00
 - f) Beban Bunga Rp. 0
 - g) Beban Subsidi Rp. 0
 - h) Beban Hibah Rp. 53.033.392.647,00
 - i) Beban Bantuan Sosial Rp. 2.654.700.000,00
 - j) Beban Penyusutan dan Amortisasi Rp. 155.663.645.843,66
 - k) Beban Penyisihan Piutang Rp. 1.852.400.814,35
 - l) Beban Transfer Rp. 76.189.721.700,00
 - m) Beban Lain-lain Rp. 528.400.196,00

Perlakuan Akuntansi Transaksi Beban Yaitu :

Tabel 4 Jurnal Akuntansi Transaksi Beban

Tgl	Keterangan	Debit (Rp)	Kredit (Rp)
	Beban	1.232.938.113.326,73	
	Kas Daerah Pengeluaran		1.232.938.113.326,73

2. Dilaporkan secara lengkap
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Pinrang dilaporkan secara lengkap artinya bahwa laporan keuangan disusun dengan memenuhi syarat-syarat yaitu sebagai berikut :
- a. Relevan
LKPD Pemerintah Kabupaten Pinrang dikatakan relevan apabila informasi yang termuat di dalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini, dan memprediksi masa depan, serta menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu.
 - 1) Relevansi Informasi LRA dalam Pengambilan Kebijakan
Ditinjau dari karakteristik relevansi informasi informasi keuangan terhadap pengambilan keputusan manajerial, maka penyajian LRA tersebut memberikan informasi yang memiliki manfaat umpan balik (*feedback value*) dan manfaat prediktif (*predictive value*) dalam mendukung pengambilan keputusan manajemen pemerintah Kabupaten Pinrang.
 - a) Manfaat umpan balik (*feedback value*) antara lain tingkat realisasi pencapaian target pendapatan daerah, penyerapan anggaran, sehingga dapat digunakan untuk melakukan koreksi-koreksi atas kinerja keuangan masa lalu, serta dapat digunakan untuk melakukan koreksi atas perencanaan pada tahun berikutnya dalam mengalokasikan anggaran pada tahunberikutnya (proses anggaran). Namun demikian, manfaat tersebut akan dapat diperoleh oleh para pengguna atau pembaca laporan keuangan, apabila penyajian kuantitatif LRA tersebut dilengkapi dengan informasi kualitatif dalam Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) yang merupakan salah satu

komponen laporan ekuangan pemerintah daerah. CALK telah memuat informasi tentang hambatan kendala pencapaian target pendapatan daerah atau penyerapan anggaran belanja untuk pelaksanaan program-program pemerintahan.

- b) Berdasarkan informasi tersebut, manajer publik daerah akan mampu mengalokasikan pembayaran angsuran pinjaman pada anggaran tahun berikutnya atau menaksir pendapatan daerah dari optimalisasi dana surplus. Sekali lagi, informasi LRA ini akan memberikan manfaat prediktif, apabila dilengkapi dengan informasi kualitatif yang disajikan dalam CALK. Informasi prediktif yang diperoleh dari ini antara lain tingkat beban bunga atas pinjaman yang digunakan dalam pembiayaan defisit atau tingkat pendapatan bunga/ hasil yang diperoleh dari aktivitas optimalisasi dana surplus yang diinvestasikan.
- 2) Relevansi Informasi Neraca dalam Pengambilan Kebijakan
- Informasi keuangan yang disajikan dalam neraca tersebut, masih terbatas informasi keuangan kuantitatif yang mempunyai nilai manfaat umpan baik (*feedback value*) maupun nilai prediktif (*predictive value*). Namun demikian, baik nilai umpan balik maupun prediktif ini tidak akan dapat diakses oleh para pengguna atau pembaca laporan keuangan sebagai informasi dalam rangka pengambilan keputusan manajerial. Manfaat prediktif dan umpan balik hanya akan dapat diakses, jika informasi keuangan kuantitatif dalam neraca disertai dengan penjelasan informasi kualitatif dalam CALK.
- Informasi keuangan kualitatif yang telah disajikan dalam CALK antara lain:
- a) Informasi kualitatif atas nilai aset lancar, berupa Kas/Setara Kas, piutang dan persediaan. Aset lancar mencerminkan tingkat likuiditas organisasi untuk memenuhi kebutuhan jangka pendeknya (periode kurang dari 12 bulan). Informasi kualitatif yang telah disajikan dalam CALK antara lain posisi kas telah mampu untuk menutupi kebutuhan operasional pemerintah daerah dalam jangka pendek; kualitas persediaan masih dapat digunakan untuk operasional instansi dalam jangka pendek, piutang daerah dapat ditagih dalam jangka pendek untuk dapat digunakan sebagai sumber pembiayaan jangka pendek.
- b) Informasi kualitatif atas aset tetap yang merupakan sumber daya ekonomi yang mempunyai manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan baik dalam penyelenggaraan pemerintahan maupun pelayanan kepada masyarakat. CALK telah memberikan tambahan informasi kualitatif, seperti informasi tentang kualitas aktiva tetap, seperti : kondisi aset (Baik/ Rusak Ringan/ Rusak Berat), tingkat perputaran (*turnover*) aset yang memberikan gambaran tingkat efektivitas atau kemampuan aset tertentu dalam menghasilkan pendapatan daerah, serta aset tetap lainnya yang belum atau tidak memberikan manfaat ekonomis pada masa mendatang
- c) Informasi kualitatif atas kewajiban yang merupakan jumlah pengorbanan sumber daya yang menjadi kewajiban Pemda untuk menyelesaikannya baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. CALK telah memberikan tambahan informasi kualitatif tentang jumlah hutang pokok, tingkat suku bunga yang menjadi beban tahunan, lama angsuran pinjaman, serta ada atau tidaknya ikatan atas transaksi hutang terhadap manajemen Pemda.

- 3) Relevansi Informasi LAK dalam Pengambilan Kebijakan
- Secara kuantitatif, LAK telah memberikan informasi yang bermanfaat umpan balik (*feedback value*) maupun manfaat prediktif (*predictive value*), khususnya bagi bendahara umum daerah. LAK memberikan informasi dinamis atas pengelolaan kas daerah yaitu sumber perolehan dana (kas) maupun alokasi penggunaan dana (kas) menurut kelompok/klasifikasi penggunaannya.
- Manfaat umpan balik diinformasikan dari penerimaan dan alokasi sumber dana (kas), baik dari aktivitas operasional, investasi, pembiayaan maupun aktivitas non anggaran. Seperti sumber penerimaan yang digunakan untuk operasional kegiatan pemerintahan serta alokasi belanjanya; sumber dan alokasi investasi aktiva tetap serta sumber dan alokasi dana (kas) dari SILPA.
 - Sementara itu, informasi kenaikan kas dan saldo kas dapat memberikan informasi prediktif (*predictive value*), seperti jumlah tabungan pemerintah yang dapat digunakan untuk mendukung aktivitas investasi, jumlah dana yang tersedia untuk membayar hutang atau saldo dana yang dapat diinvestasikan, informasi pelunasan utang dan jumlah investasi yang mampu menghasilkan pendapatan untuk periode berikutnya.
- Namun demikian, informasi kuantitatif tersebut perlu mendapat tambahan informasi kualitatif yang dituangkan dalam CALK. CALK perlu memberikan informasi tambahan yang bermanfaat untuk pengambilan keputusan, seperti:
- Kebutuhan dana (kas) aktivitas operasional secara bulanan, sehingga dapat memberikan informasi apakah saldo kas (SILPA) cukup untuk membiayai aktivitas bulanan pada periode selanjutnya.
 - Alokasi dana (kas) untuk investasi agar dijelaskan jenis aset, kualitas (kondisinya) serta potensi untuk memberikan dampak keuangan daerah periode berikutnya maupun dampak pelayanan kepada masyarakat.
 - Saldo kas dari aktivitas pembiayaan akan lebih memberikan informasi yang relevan jika ditambahkan informasi kualitatif dalam CALK tentang jumlah angsuran pokok hutang, proporsi penyertaan modal pemerintah pada BUMN/D, sehingga mampu untuk menghitung proyeksi pendapatan pada masa yang akan datang.
- 4) Relevansi Informasi CALK dalam Pengambilan Kebijakan
- CALK merupakan komponen laporan keuangan yang lebih dominan memberikan informasi keuangan kualitatif yang menjelaskan dan memberikan informasi latar belakang data-data kuantitatif yang disajikan dalam LRA, Neraca dan LAK. Oleh karena itu, informasi dalam CALK sangat bermanfaat sekali bagi pembaca laporan keuangan untuk menjadikan informasi tersebut sebagai dasar pengambilan keputusan manajerial. Dengan demikian dapat dikatakan, CALK sangat relevan dengan kebutuhan informasi untuk pengambilan keputusan, sepanjang informasi yang disajikan lengkap dan jelas serta terbuka (transparan).
- 2) Tepat waktu
- Berdasarkan Laporan Hasil Reviu Inspektorat Kabupaten Pinrang Nomor 700/015/Inspektorat tanggal 17 Maret 2020, Tim Inspektorat Kabupaten Pinrang telah mereviu Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Pinrang berupa Neraca per 31 Desember 2019, laporan realisasi anggaran, laporan operasional, laporan perubahan ekuitas, laporan perubahan saldo anggaran lebih, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019

berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang pelaporan keuangan dan kinerja instansi Pemerintah.

3) Lengkap

Informasi akuntansi keuangan pemerintah daerah kabupaten pinrang disajikan secara lengkap mencakup semua informasi akuntansi yang berpengaruh dalam pengambilan keputusan. Setiap informasi utama dalam laporan keuangan disajikan secara detail dan jelas sehingga kesalahan yang bisa muncul dapat dicegah.

Berdasarkan undang-undang nomor 15 tahun 2004 tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara dan undang-undang nomor 15 tahun 2006 tentang badan pemeriksa keuangan, BPK telah memeriksa laporan keuangan pemerintah kabupaten pinrang, yang terdiri dari neraca tanggal 31 desember 2019, laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran lebih, laporan operasional, laporan arus kas, dan laporan perubahan ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta catatan atas laporan keuangan.

b. Andal

Informasi dalam laporan keuangan pemerintah daerah kabupaten pinrang bebas dari pengertian yang menyesatkan, menyajikan setiap fakta secara jujur, dapat diverifikasi. Laporan keuangan pemerintah daerah disajikan secara andal karena:

1) Penyajian jujur

Berdasarkan laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Pinrang Tahun Anggaran 2019 oleh Badan Pemeriksa keuangan Republik Indonesia Perwakilan Sulawesi Selatan Nomor 37.A/LHP/XIX.MKS/05/2020 Tanggal 28 Mei 2020, Laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Pinrang telah disajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Pemerintah Kabupaten Pinrang tanggal 31 Desember 2019 dan Realisasi Anggaran, Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Operasional, Arus Kas, serta Perubahan Ekuitas untuk Tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

2) Dapat Diverifikasi

Berdasarkan hasil revidu laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Pinrang oleh Tim Revidu Inspektorat Kabupaten Pinrang, disimpulkan bahwa :

- a) Penyajian LRA Tahun Anggaran 2019 telah disusun oleh Pemerintah Kabupaten Pinrang berdasarkan akuntansi dan data pendukung lainnya. Data LRA dapat diuji silang dengan SPJ-SPJ yang telah dibuat oleh SKPD dan Telah dilakukan Prosedur Analitis
- b) Penyajian Neraca SKPD secara keseluruhan telah disusun oleh masing-masing SKPD untuk Tahun Anggaran 2019. Neraca pada LKPD Kabupaten Pinrang pun merupakan hasil konsolidasian LK-SKPD dan Telah dilakukan Prosedur Analitis.

3) Netralitas

Untuk memperoleh keyakinan yang memadai atas kewajaran laporan keuangan tersebut, BPK juga melakukan pemeriksaan terhadap sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan. Laporan hasil pemeriksaan atas sistem pengendalian intern dan laporan hasil pemeriksaan atas kepatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan di sajikan dalam laporan nomor 37.B/LHP/XIX.MKS/05/2020 tanggal 28 mei 2020.

- b. Dapat Dibandingkan
Informasi yang termuat dalam laporan keuangan pemerintah daerah kabupaten Pinrang disajikan dengan cara dibandingkan dengan periode sebelumnya.
 - c. Dapat Dipahami
Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Pinrang dapat dipahami sebab bentuk penyajiannya disederhanakan dan menggunakan istilah yang mudah dipahami oleh semua pengguna laporan keuangan.
3. Diaudit secara independent
Laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Pinrang telah diaudit secara independent melalui :
- a. Audit BPK RI
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Pinrang di audit berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004 tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara dan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan. BPK telah memeriksa laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Pinrang yang terdiri dari Neraca, LRA, LO, LAK, LP-SAL, LPE, serta CALK. Pemerintah Daerah Kabupaten Pinrang menyusun dan menyajikan laporan keuangan secara wajar sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan sehingga laporan keuangan bebas dari kesalahan penyajian material. BPK yakin bahwa bukti yang diperoleh dari pemeriksaan adalah cukup dan tepat sebagai dasar untuk menyatakan opini BPK. Laporan Keuangan yang disajikan pemerintah daerah kabupaten Pinrang disajikan secara wajar sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.
 - b. Reviu Inspektorat Kabupaten Pinrang
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Pinrang juga telah di reviu oleh Inspektorat Kabupaten Pinrang.

Pembahasan

1. Diakuntansikan dengan benar
Laporan Keuangan tersebut telah diakuntansikan dengan benar karena memenuhi Syarat sebagai berikut :
 - a. Menerapkan sistem akuntansi berbasis akrual
Sistem Akuntansi berbasis akrual diterapkan pada pelaporan Keuangan Kabupaten Pinrang secara perlahan, sebab penerapan sistem akrual memerlukan sumber daya manusia yang siap dengan segala perubahan. Pelatihan Komputerisasi dilakukan secara intensif agar mendukung penerapan sistem akrual tersebut. Standar-standar yang berlaku dalam akuntansi sistem akrual diterapkan sedikit demi sedikit termasuk pengakuan dan perlakuan termasuk perlakuan akuntansi untuk Pendapatan, Belanja, Dan Transfer sesuai dengan standar akuntansi akrual.
 - b. Ringkasan Laporan Keuangan
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Pinrang yang terdiri dari LRA, LO, LPE, LAK, LP-SAL, NERACA, CALK, telah disusun dan diringkas dengan baik sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan yang termaktub dalam PP No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Daerah. Penyajian Laporan Keuangan juga lakukan dengan menggunakan istilah dan bahasa yang mudah dipahami oleh semua kalangan pengguna Informasi Akuntansi.
2. Dilaporkan secara lengkap
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah disajikan dengan lengkap dengan memenuhi syarat berdasarkan karakteristik Laporan Keuangan Berdasarkan PP 71 Tahun 2010 yaitu:

a. Relevan

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Merupakan sebuah pertanggungjawaban pemerintah daerah tentang kinerja pemerintah daerah secara ekonomi selama 1 tahun periode berjalan. Oleh karena itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Pinrang bertanggung jawab penuh dalam menyajikan laporan keuangan dengan relevan. Pemerintah Daerah Kabupaten Pinrang berusaha menyajikan bentuk Laporan pertanggungjawaban setiap program yang dijalankan melalui pelaporan keuangan untuk memenuhi kepentingan transparansi dan akuntabilitas.

b. Andal

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Pinrang dikatakan andal sebab telah bebas dari penyajian informasi yang menyesatkan. Artinya Laporan keuangan tersebut disajikan secara riil dan memiliki bukti yang cukup apabila sewaktu-waktu ingin di verifikasi.

c. Dapat Dibandingkan

Laporan keuangan yang dimiliki oleh pemerintah daerah kabupaten pinrang disajikan dengan cara membandingkan realisasi tahun berjalan dengan tahun sebelumnya. Pemerintah Daerah Kabupaten Pinrang selalu mengusahakan agar penyajian laporan keuangan dari tahun ke tahun selalu mengalami perbaikan sehingga dapat diperbandingkan setiap tahunnya.

d. Dapat Dipahami

Laporan keuangan pemerintah daerah kabupaten pinrang disajikan dengan menggunakan bahasa yang mudah dipahami. Hal ini, dilakukan karena pengguna akuntansi pemerintah daerah kabupaten pinrang bukan hanya berasal dari golongan orang-orang yang terbiasa dengan bahasa akuntansi namun juga berasal dari kalangan orang-orang yang awam dengan istilah-istilah akuntansi.

3. Diaudit secara Independen

Tanggung jawab auditor independen adalah untuk memberikan tanggapan atau opini dengan adanya laporan keuangan yang disajikan pemerintah daerah berdasarkan hasil pemeriksaan. Sebelum memberikan tanggapan atau opini, Para auditor harus mematuhi kode etik pemeriksaan. Pemeriksaan yang dilakukan meliputi pengujian bukti-bukti yang disajikan pemerintah daerah terkait laporan keuangan yang disajikan. Pemeriksaan yang dilakukan terkait pemeriksaan salah saji materi dalam laporan keuangan.

Oleh karena itu, Pemerintah Daerah menyajikan laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan yang berlaku dengan berusaha menghindari kecurangan dan salah saji materi. Oleh karena itu, hasil audit BPK RI memberikan hasil audit dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian. Ini merupakan bentuk penyajian laporan keuangan pemerintah daerah yang tidak menyesatkan. Dan dapat dikatakan bahwa laporan keuangan pemerintah daerah diyakini sangat berkualitas karena memenuhi standar penyajian laporan keuangan berdasarkan PP NO.71 Tahun 2010.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Pinrang memenuhi syarat untuk dikatakan berkualitas sebab telah memenuhi 3 (tiga) syarat utama yaitu diakuntansikan dengan benar, dilaporkan secara lengkap, dan diaudit secara Independen.

Saran

Pemerintah Daerah Kabupaten Pinrang harus menindaklanjuti hal-hal yang masih menjadi catatan dalam pelaporan keuangan, serta menerapkan secara utuh sistem akrual dalam pelaporan keuangan. Dan Pemerintah Daerah tidak boleh berpuas diri atas

hasil audit yang diberikan oleh BPK RI dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian sebanyak 8 kali berturut-turut. Harus ada strategi untuk mempertahankan prestasi demikian dan hal-hal yang masih menjadi catatan BPK RI perlu segera dievaluasi.

DAFTAR PUSTAKA

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pinrang. Pinrangkab.go.id Wahyudiono, Bambang. 2014. *Mudah Membaca Laporan Keuangan*. Jakarta: Raih Asa Sukses (Penebar Swadaya Grup).

Dita Arfianti (2011). "ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI NILAI INFORMASI PELAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH (Studi Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Di Kabupaten Batang)". Fakultas Ekonomi. Universitas Diponegoro :Semarang

<http://bpkad.banjarkab.go.id/index.php/2017/09/11/sistem-akuntansi-keuangan-pemerintah-daerah/>

<https://www.seputarpengetahuan.co.id/2017/10/pengertian-laporan-keuangan-menurut-para-ahli.html>

<https://andichairilfurqan.wordpress.com/tag/laporan-perubahan-saldo-anggaran-lebih/>

Laporan Keuangan Kabupaten Pinrang diperoleh dari Badan Keuangan Kabupaten Pinrang

Nomor 213/PMK.05/2013 tentang *Sistem Akuntansi Dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat*

Peraturan Pemerintah 71 tahun 2010 tentang *Standar Akuntansi Pemerintahan*

Perdirjen Nomor Per 60/PB/2013 tentang *Pedoman Bimbingan Pelaksanaan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pada Kementerian Negara /Keuangan*

Safrida, Nadirsyah, Usman Bakar. 2010. *Pengaruh Pemahaman Akuntansi, Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah Dan Peran Internal Audit Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Pada Pemerintah Kota Banda Aceh)* Jurnal Telaah & Riset Akuntansi. Vol. 3.No. 2. Juli 2010 : Hal. 206-220

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang *Keuangan Daerah*

Wahyudiono, Bambang. 2014. *Mudah Membaca Laporan Keuangan*. Jakarta: Raih Asa Sukses (Penebar Swadaya Grup).

_____ Undang-undang Dasar Republik Indonesia 1945,

_____ Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang *Keuangan Negara*.

_____ Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang *Perbendaharaan Negara*.